

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi & Keadilan Gender

Catatan Jurnal Perempuan

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi & Keadilan Gender

Artikel

Tubuhku, Bukan Milikku: Pasal 463 KUHP Baru Ditinjau dari Perspektif Hukum Feminis
Lidwina Inge Nurtjahyo

Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam Kerapuhan Sistem Pangan Komunitas di Perdesaan Indonesia
Widya Hasian Situmeang, Fairuz Rafidah Aflaha, & Wahyu Ridwan Nanta

Kekerasan Seksual: Berkelindan di Antara Norma Hukum dan Agama
Maria Ulfah Anshor

Opresi dan Kuasa atas Tubuh Perempuan dalam Tradisi Masyarakat Budaya (Studi Kasus: Sunat Perempuan di Banten)
Adinda Putri Kirana Lutfi & Sri Lestari Wahyuningroem

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Perempuan: Kajian Perbandingan Mengenai Pengaturan tentang Aborsi di Nepal dan Indonesia
Yogi Paramitha Dewi

Pengetahuan dan Keterampilan Artikulasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di Kalangan Perempuan Muda Asli Papua
Desintha Dwi Asriani, Godefridus Samderubun, & Eling Wening Pangestu

Feminisme dan Keadilan Reproduksi: Mempersoalkan Aborsi Berdasarkan Pengalaman Aktivismen HKSR
Abby Gina Boang Manalu & Asri Pratiwi Wulandari

Diterbitkan oleh:

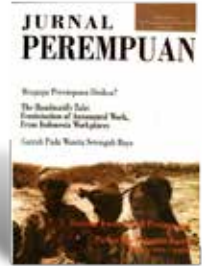


Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

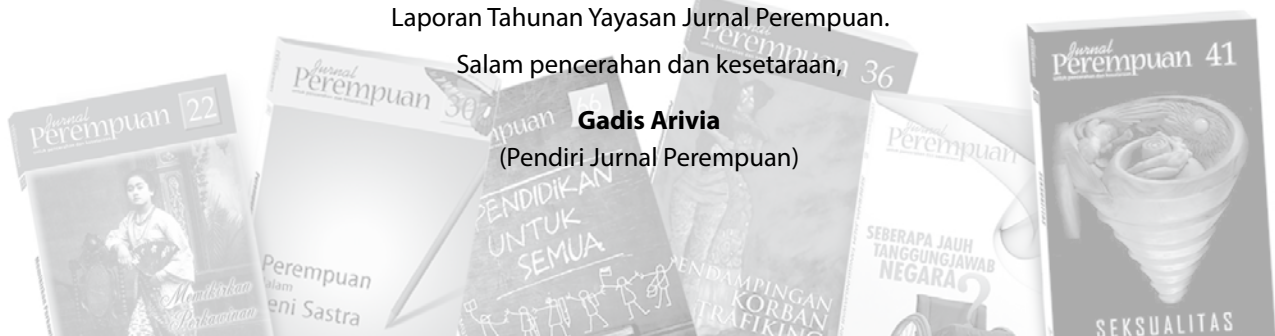
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Prof. Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif, M.Fil. (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Prof. Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto

DEWAN REDAKSI

Dr. Abby Gina Boang Manalu, M.Hum. (Jurnal Perempuan)
Prof. Dr. Gadis Arivia (Sosiologi, Montgomery College, Takoma Silver Spring, Maryland, USA)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIP, Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Abby Gina Boang Manalu, M.Hum.

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
Prof. Dr. E. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor, M.Si. (Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik Atma Jaya)
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Prof. Dr. Widjanti Mulyono Santoso, M.Litt. (Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M.Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Mia Siscawati, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. L.G. Saraswati Putri (Universitas Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (President University)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen)

REDAKSI

Retno Daru Dewi G.S. Putri, M.A., M.Hum.
Iqraa Runi Aprilia, S.Hum.
Nada Salsabila, S.Hum.

REDAKSI TAMU

Ikhaputri Widiyanti, S.Hum., M.Si.
Andi Misbahul Pratiwi, S.T., M.Si.

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah
Iqraa Runi Aprilia, S.Hum.

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN

Himah Sholihah 0818 0712 4295 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI

Alamanda Tower, 25th Floor
Jalan T.B. Simatupang kavling 23-24, Jakarta Selatan
Telepon: (+62) 21 2965 7992
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com
Twitter: @jurnalperempuan
Facebook: Yayasan Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan Pertama, April 2023

Ucapan Terima Kasih kepada Mitra Bestari dan Dewan Redaksi

1. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto
2. Prof. Dr. Widjajanti Mulyono Santoso, M.Litt.
3. Dr. Ida Ruwaida Noor, M.Si.
4. Dr. Pinky Saptandari
5. Prof. Dr. Musdah Mulia
6. Mariana Amiruddin, M.Hum.
7. Dr. L.G. Saraswati Putri
8. Dr. Nur Iman Subono
9. Dr.(iur). Asmin Fransiska
10. Soe Tjen Marching, Ph.D.
11. Dr. Sri Lestari Wahyuningroem
12. Ruth Indiah Rahayu, M.Fil.
13. Prof. Dr. Gadis Arivia
14. Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D.

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi & Keadilan Gender/ <i>Sexual and Reproductive Health and Rights & Gender Justice</i>	v-vi
<i>Abby Gina Boang Manalu</i>	

Artikel

• Tubuhku, Bukan Milikku: Pasal 463 KUHP Baru Ditinjau dari Perspektif Hukum Feminis/ <i>My Body Is Not Mine: Analysing the Article 463 of Indonesia's New Penal Code from the Feminist Legal Perspective</i>	1-10
<i>Lidwina Inge Nurtjahyo</i>	
• Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam Kerapuhan Sistem Pangan Komunitas di Perdesaan Indonesia/ <i>Fulfillment of Sexual and Reproductive Health and Rights in the Fragile Community Food Systems in Rural Indonesia</i>	11-23
<i>Widya Hasian Situmeang, Fairuz Rafidah Aflaha, & Wahyu Ridwan Nanta</i>	
• Kekerasan Seksual: Berkelindan di Antara Norma Hukum dan Agama/ <i>Sexual Violence: Intertwined Between Legal and Religious Norm</i>	25-36
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Opresi dan Kuasa atas Tubuh Perempuan dalam Tradisi Masyarakat Budaya (Studi Kasus: Sunat Perempuan di Banten)/ <i>Oppression and Power Over Women's Body in the Tradition of Cultural Society (A Case Study: Female Genital Mutilation in Banten)</i>	37-47
<i>Adinda Putri Kirana Lutfi dan Sri Lestari Wahyuningroem</i>	
• Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Perempuan: Kajian Perbandingan Mengenai Pengaturan tentang Aborsi di Nepal dan Indonesia/ <i>Women's Right to Sexual and Reproductive Health: A Comparative Study of Abortion Legal Frameworks in Nepal and Indonesia</i>	49-60
<i>Yogi Paramitha Dewi</i>	
• Pengetahuan dan Keterampilan Artikulasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di Kalangan Perempuan Muda Asli Papua/ <i>The Knowledge and Skill to Articulate Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) among Indigenous Young Women in Papua</i>	61-72
<i>Desintha Dwi Asriani, Godefridus Samderubun, & Eling Wening Pangestu</i>	
• Feminisme dan Keadilan Reproduksi: Mempersoalkan Aborsi Berdasarkan Pengalaman Aktifisme HKSR/ <i>Feminism and Reproductive Justice: Shaping Abortion Discourse Based on the Experience of SRHR Activism</i>	73-86
<i>Abby Gina Boang Manalu & Asri Pratiwi Wulandari</i>	

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi & Keadilan Gender

Sexual and Reproductive Health and Rights & Gender Justice

Pemenuhan yang inklusif dan utuh sangat penting untuk kesejahteraan setiap orang atas HKSR. Pemenuhan HKSR juga merupakan prasyarat untuk mencapai keadilan gender. HKSR tidak dapat diisolasi sebagai isu kesehatan belaka. Tidak terpenuhinya hak ini dapat berdampak pada ketidakberdayaan dan masuknya perempuan ke dalam berbagai lingkaran setan, seperti tercerabutnya akses pendidikan, kerja, kesehatan, kerentanan atas kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya.

Hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) adalah isu feminisme dan HAM. Sejumlah sarjana feminis percaya bahwa sejarah telah menunjukkan bahwa kapasitas reproduksi perempuan telah digunakan sebagai alat untuk menindas perempuan. Untuk menjamin kesetaraan gender, otonomi dan kebebasan reproduksi menjadi inti perjuangan hak reproduktif (Collins 1987). Perjuangan feminis telah membawa capaian diakui HKSR sebagai hak yang harus dilindungi secara global. Sejak diadopsinya ICDP oleh 179 negara di dunia tahun 1994, HKSR adalah hak yang harus dilindungi oleh setiap negara yang meratifikasi ICDP, termasuk Indonesia. Kesetaraan dalam kesehatan reproduksi meliputi akses layanan kesehatan yang tanpa diskriminasi dan terjangkau, kontrasepsi yang berkualitas termasuk kontrasepsi darurat (UHHCR 2017). Kendati demikian, hampir 30 tahun sejak saat itu masih terdapat banyak hambatan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya untuk mengakses HKSR.

UNFPA dalam laporannya program 2018--2023 di Indonesia menyatakan bahwa tahun 2018 Indonesia menghadapi sejumlah tantangan terkait penyediaan layanan kesehatan seksual dan reproduksi secara merata. Setidaknya ada beberapa isu yang menjadi tantangan utama, yaitu kematian ibu dan kualitas pelayanan kesehatan yang tidak optimal; kebutuhan KB yang tidak terpenuhi; kehamilan remaja serta kurangnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi; dan kekerasan berbasis gender serta praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan (UNFPA 2023). Seluruh persoalan ini terus direproduksi di Indonesia karena implementasi dari HKSR sering kali ditolak dengan membenturkannya dengan nilai agama dan budaya (UNHCR 2017), menghasilkan eksklusivitas perempuan dari mendapatkan penyelamatan nyawa, perawatan, obat-obatan, dan informasi yang

komprehensif terkait seksual dan reproduksi. Artinya, perjuangan reproduksi berbasis hak saja tidak cukup.

Dalam diskursus reproduksi dan seksual, telah terjadi pergeseran paradigma. Perjuangan awal dimulai dari desakan atas akses kesehatan, bergerak pada tataran desakan hak reproduksi yang berfokus pada kebebasan reproduksi perempuan melalui sistem hukum. Kerangka hak telah memberikan sumbangan besar bagi keadilan gender dalam reproduksi, isu yang diperdebatkan mencakup hak aborsi, pendidikan seks, dan perencanaan keluarga. Kerangka ini memungkinkan gerakan feminisme di seluruh dunia untuk mendesak tanggung jawab negara atas HKSR perempuan. Namun demikian, efektivitas hukum yang berlaku dalam jaminan hak reproduksi tidak secara proporsional melihat bahwa ada persoalan interseksional dalam kerangka pembahasannya. Penegakan hak reproduksi harus dibarengi bersamaan dengan perjuangan keadilan sosial (Pacia 2020; Ross 2017). Jika tidak, maka yang terjadi adalah pertama, hadirnya kebijakan HKSR yang tidak akomodatif dan diskriminatif terhadap perempuan. Kedua, sekalipun telah ada aturan yang membawa ide atau peluang pemenuhan HKSR, namun pada implementasinya, perempuan akan tetap sulit atau bahkan tidak dimungkinkan mengaksesnya karena nilai dan praktik institusi dan komunitas setempat. Menurut Ross (2017), relasi antara ras, kelas, identitas gender, disabilitas, masyarakat adat, keragaman gender, dan identitas lainnya perlu diperiksa bersamaan dengan hak reproduksi (2017).

Persoalan seperti aborsi, kontrasepsi, HIV/AIDS, praktik budaya yang berbahaya, dan kekerasan berbasis gender adalah beberapa isu keadilan reproduksi yang diangkat dalam Jurnal Perempuan edisi 114 menggunakan matra feminisme. Di dalam keadilan reproduktif dan di dalam JP 114 ini, isu aborsi adalah isu penting dalam perjuangan feminisme sebab persoalan, seperti kriminalisasi aborsi, ketidakterediaan layanan aborsi, dan stigma masyarakat adalah isu yang selalu berkelindan di dalamnya, seperti **Lidwina Inge** dalam artikelnya membahas tentang bagaimana aborsi dipersepsikan dalam Pasal 463 KUHP Baru yang dibandingkan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melalui perspektif hukum feminis dalam 2 putusan MA. **Maria Ulfah Anshor** mempersoalkan mengenai hak korban kekerasan seksual terhadap akses

aborsi. Menurutnya, hukum dan pemahaman agama bermasalah sebab tidak memiliki logika keberpihakan pada korban. **Yogi Paramitha Dewi** mengkaji pengaturan aborsi sebagai bagian dari hak kesehatan seksual dan reproduksi melalui lensa feminisme dengan membedah derajat pengakuan atas integritas tubuh, *personhood*, kesetaraan, dan keberagaman perempuan. **Abby Gina Boang Manalu & Asri Pratiwi Wulandari** merefleksikan secara kritis dengan lensa feminisme tentang situasi ketidakadilan reproduktif dalam isu aborsi di Indonesia berdasarkan pengetahuan aktivis perempuan yang mengadvokasi HKSR. Selain isu aborsi, edisi ini juga secara kritis membincang keterkaitan antara Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual dalam Kerapuhan Sistem Pangan Komunitas di Perdesaan Indonesia, khususnya di Desa Darim dengan menggunakan lensa ekologi politik feminis di dalam artikel **Widya Hasian Situmeang, Fairuz Rafidah Aflaha, & Wahyu Ridwan Nanta**. Edisi ini juga membincang tentang pemenuhan

HKSR dalam konteks Papua yang melingkupi isu-isu spesifik, seperti KTD, HIV/AIDS, dan kekerasan terhadap perempuan, penelitian ini ditulis oleh **Desintha Dwi Asriani, Godefridus Samderubun, & Eling Wening Pangestu**. Topik lain yang juga amat penting dan terjadi di Indonesia adalah praktik budaya yang berbahaya bagi perempuan. **Adinda Putri Kirana Lutfi & Sri Lestari Wahyuningroem** memeriksa persoalan sunat perempuan di Banten berbasis pada kritik politik identitas. Pemikiran Okin (1989) dan Young (1990) dipakai sebagai alat untuk memeriksa ketimpangan dalam tradisi tersebut.

Seluruh penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan reproduktif adalah isu yang berkelindan antara kesehatan, hak, dan budaya. Ia dibangun berdasarkan perjuangan di tingkat lokal, nasional, dan global yang mengakomodasi situasi-situasi ketidakadilan reproduktif yang amat plural. Penelitian ini bertujuan memperkaya diskursus HKSR dan Keadilan Gender di Indonesia (**Abby Gina**).

Lidwina Inge Nurtjahyo

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tubuhku, Bukan Milikku: Pasal 463 KUHP Baru Ditinjau dari Perspektif Hukum Feminis

My Body Is Not Mine: Analysing the Article 463 of Indonesia's New Penal Code from the Feminist Legal Perspective

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 1, April 2023, hlm. 1—10, 18 daftar pustaka

This article discusses abortion as perceived in Article 463 of the New Criminal Code as compared to Law No. 36 of 2009 concerning Health. This article is analyzed using the feminist legal perspective. To illustrate the state's intervention on women's reproductive health issues in terms of abortion, two cases obtained from the search results of the Supreme Court's decision directory are included. Article 463 of the New Criminal Code does not provide access for abortion in the context of the health condition of pregnant women as stipulated in the Health Law. Then in the explanatory part of the article, it tends to narrow the concept of sexual violence where abortion is only allowed to be carried out by victims of sexual violence in the form of sexual exploitation/forced prostitution. The findings of this research is that the law does not accommodate women's experience as a whole, and the fact that pregnancy can occur after a single case of rape. Furthermore, the law does not accommodate the necessity of abortion for pregnant women in emergency health condition. The government and the legislative should produce regulations which accommodate women's unique experience, especially in terms of reproductive rights issues.

Keywords: unwanted pregnancy, abortion, feminist legal perspective, health reproduction

Artikel ini membahas bagaimana aborsi dipersepsikan dalam Pasal 463 KUHP Baru yang dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Analisis pasal ini menggunakan perspektif hukum feminis. Sebagai ilustrasi intervensi negara terhadap masalah kesehatan reproduksi perempuan dalam hal aborsi, disertakan dua kasus yang diperoleh dari hasil penelusuran direktori putusan MA. Pasal 463 KUHP Baru tidak memberi akses aborsi dalam konteks pertimbangan kesehatan ibu hamil sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan. Bagian penjelasan pasal tersebut cenderung mempersempit pengertian kekerasan seksual bahwa aborsi hanya diperbolehkan untuk korban kekerasan seksual berbentuk eksploitasi seksual yaitu prostitusi paksa. Temuan kajian ini adalah aturan hukum tidak mengakomodasi pengalaman perempuan secara keseluruhan bahwa kehamilan bisa terjadi karena satu kali perkosaan. Kemudian, pasal ini juga tidak mengakomodasi kebutuhan aborsi bagi ibu hamil yang mengalami kondisi kesehatan darurat. Penting agar pemerintah dan lembaga legislatif dapat menghasilkan peraturan yang lebih mengakomodasi pengalaman perempuan yang khas, khususnya dalam isu hak reproduksi.

Kata kunci: kehamilan tidak diinginkan, aborsi, perspektif hukum feminis, kesehatan reproduksi

Widya Hasian Situmeang¹, Fairuz Rafidah Aflaha², & Wahyu Ridwan Nanta³

Agricultural Production Technology and Community Development Study Program, IPB Vocational School¹, Yeungnam University², & Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan³

Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam Kerapuhan Sistem Pangan Komunitas di Perdesaan Indonesia

Fulfillment of Sexual and Reproductive Health and Rights in the Fragile Community Food Systems in Rural Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 1, April 2023, hlm. 11—23, 1 tabel, 54 daftar pustaka

Women's authority over their bodies is often ignored due to limited choices and access to resources. This study intends to photograph the failure of development governance, especially in the food and environmental sectors, which places women as the exploited party. This research uses the concept of feminist ecology as a rationale in studying women's experiences and their relation to the fragility of the food system. The research method used in this research is a qualitative approach through in-depth interviews and observations in the area of Kampung Darim which is uniquely divided into the territories of Kedayakan Village and Puntang Village with a food-agricultural ecosystem background in Indramayu Regency, West Java. These two villages are one of the food barn areas and have a high tendency for the practice of early marriage to occur. The results of the study show that the commodification of natural resources, especially food, tends to reduce the function of food production to fulfilling daily needs. More than that, it also ignores cultural practices that are closely tied to the food system. This paper intends to raise the experience of women who are vulnerable to exploitation due to the failure of the food system. Apart from experiencing exploitation as a result of failure to manage natural resources, rural women in this study are also a group at high risk of experiencing sexual and reproductive health threats. The development of the food system needs to be improved by placing women as equal subjects.

Keywords: exploitation, reproduction health, woman, food system

Otoritas perempuan terhadap tubuhnya kerap diabaikan akibat terbatasnya pilihan dan akses terhadap sumber daya. Penelitian ini bermaksud memotret kegagalan tata kelola pembangunan khususnya pada sektor pangan dan lingkungan yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang mengalami eksploitasi. Penelitian ini menggunakan konsep ekologi feminis sebagai dasar pemikiran dalam mempelajari pengalaman perempuan dan kaitannya dengan kerapuhan sistem pangan. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi di wilayah Kampung Darim yang uniknyanya terbagi menjadi wilayah teritori Desa Kedayakan dan Desa Puntang dengan latar belakang ekosistem pertanian pangan pada Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kedua desa ini merupakan salah satu wilayah lumbung pangan dan memiliki kecenderungan praktik pernikahan dini masih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan komodifikasi sumber daya alam, khususnya bahan pangan, cenderung mereduksi fungsi produksi bahan pangan menjadi sebatas pemenuhan kebutuhan harian. Lebih dari itu, hal tersebut juga mengabaikan praktik budaya yang terikat erat dengan sistem pangan. Tulisan ini bermaksud mengangkat pengalaman perempuan yang rentan mengalami eksploitasi akibat kegagalan sistem pangan. Selain mengalami eksploitasi sebagai akibat kegagalan pengelolaan sumber daya alam, perempuan perdesaan pada studi ini juga menjadi kelompok yang berisiko tinggi mengalami ancaman kesehatan seksual dan reproduksi. Pembangunan sistem pangan perlu diperbaiki dengan menempatkan perempuan sebagai subjek setara.

Kata kunci: eksploitasi, kesehatan reproduksi, perempuan, sistem pangan

Maria Ulfah Anshor
Komnas Perempuan

Kekerasan Seksual: Berkelindan di Antara Norma Hukum dan Agama

Sexual Violence: Intertwined between Legal and Religious Norm

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 1, April 2023, hlm. 25-36, 1 gambar, 38 daftar pustaka

Sexual violence experienced by women with a variety of experiences is at the risk of not being recognized by the public, even by law enforcement officials who are not conscious of a victim's perspective. This shows that there is a 'big' problem related to the public's perspective on legal norms which makes its implementation conflicting with the constitution which guarantees rights and access to justice for women as citizens. This problem is also supported by an interpretation of religion that is not in favor of victims of sexual violence. This research is carried out to ensure that women who became victims of rape have access to justice in safe abortion services guaranteed by the constitution and religion (Islam). This is the novelty of this research, which is expected to fill in the gaps in a number of previous studies. The research methodology uses a descriptive qualitative approach.

Keywords: sexual violence, gender conscious religious interpretation, gender conscious law, women rape victim, comprehensive abortion care

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dengan ragam pengalamannya rentan tidak dikenali oleh publik bahkan oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif korban. Hal tersebut menunjukkan ada masalah 'besar' terkait cara pandang publik terhadap norma hukum sehingga implementasinya bertolak belakang dengan konstitusi yang menjamin hak dan akses keadilan bagi perempuan sebagai warga negara. Masalah ini turut didukung dengan pemahaman agama yang tidak berpihak pada korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan korban perkosaan memiliki akses keadilan dalam pelayanan aborsi aman yang dijamin oleh konstitusi dan agama (Islam). Hal tersebut merupakan kebaruan dari penelitian ini yang diharapkan bisa mengisi kekosongan dari sejumlah penelitian sebelumnya. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Kata kunci: kekerasan seksual, pemahaman agama berperspektif gender, hukum berperspektif gender, perempuan korban perkosaan, pelayanan aborsi komprehensif

Adinda Putri Kirana Lutfi¹ & Sri Lestari Wahyuningroem²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Opresi dan Kuasa atas Tubuh Perempuan dalam Tradisi Masyarakat Budaya (Studi Kasus: Sunat Perempuan di Banten)

Oppression and Power Over Women's Body in the Tradition of Cultural Society (A Case Study: Female Genital Mutilation in Banten)

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 1, April 2023, hlm. 37—47, 19 daftar pustaka

This article discusses female genital mutilation which is generally based on the traditions and culture of the society, passed down from generation to generation, and strengthened through religious teachings. The practice of female circumcision is strongly related to sexual control and forms of power exerted over women. This study aims to examine the form of oppression experienced by women in cultural groups through a case study of female genital mutilation in Banten and

its impact on the recognition of women's rights in indigenous peoples. In particular, this study elaborates on the theoretical framework of forms of oppression against women in the context of the politics of recognition of cultural group identity in Banten. The research paradigm used is qualitative research methods and in-depth interview. The results of data analysis using the Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) method show that there are two forms of oppression that occur in the practice of female circumcision in Banten, namely powerlessness and violence. These forms of oppression are the impact of women's weakening in the practice of female genital mutilation which is one of the negative implications of the politics of recognition of cultural group identity in Indonesia.

Keywords: oppression, the politics of recognition, female genital mutilation

Artikel ini membahas sunat perempuan yang pada umumnya didasarkan pada tradisi dan budaya masyarakat, diturunkan dari generasi ke generasi, dan diperkuat melalui ajaran agama. Pelaksanaan sunat perempuan sangat kuat kaitannya dengan kontrol seksual dan bentuk kuasa terhadap perempuan serta melahirkan opresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk opresi yang dialami perempuan dalam kelompok budaya melalui studi kasus sunat perempuan di Banten dan dampaknya pada pengakuan hak perempuan dalam masyarakat adat. Secara khusus, kajian ini mengelaborasi opresi terhadap perempuan dalam konteks politik pengakuan identitas kelompok budaya di Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Dengan menggunakan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA), atau analisis interpretasi fenomenologis, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk opresi yang terjadi dalam praktik sunat perempuan di Banten, yaitu pelemahan (*powerlessness*) dan kekerasan (*violence*). Bentuk opresi tersebut merupakan dampak pelemahan perempuan dalam praktik sunat perempuan, yang menjadi salah satu implikasi negatif dari politik pengakuan identitas kelompok budaya yang terjadi di Indonesia.

Kata kunci: opresi, politik pengakuan, sunat perempuan

Yogi Paramitha Dewi

Peneliti, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Perempuan: Kajian Perbandingan Mengenai Pengaturan tentang Aborsi di Nepal dan Indonesia

Women's Right to Sexual and Reproductive Health: A Comparative Study of Abortion Legal Frameworks in Nepal and Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 1, April 2023, hlm. 49—60, 1 tabel, 46 daftar pustaka

The fulfillment of women's sexual and reproductive health and rights remains challenging, especially concerning one of its most controversial issues, namely abortion. While the maternal deaths caused by unsafe abortion continue to be a concern, many countries retain repressive laws by banning abortion which has often been influenced by moral and religious reasons. This article aims to examine the abortion legal framework as part of sexual and reproductive health and rights through the lens of feminism by dissecting the degree of recognition of bodily integrity, personhood, equality, and diversity of women. Through a comparative approach between Indonesia and Nepal, this paper argues that Nepal's abortion regulation has a stronger recognition of women's bodily integrity, personhood, equality, and diversity in its abortion legal framework compared to Indonesia. Therefore, Nepal's experience in regulating abortion can serve as an inspiration for Indonesia in ensuring women's sexual and reproductive health and rights.

Keywords: sexual and reproductive rights, abortion law, women, Nepal, Indonesia

Pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan masih menjadi sebuah tantangan, terutama yang menyangkut isu yang paling kontroversial yaitu aborsi. Meski kematian perempuan yang disebabkan oleh aborsi tidak aman terus menjadi kekhawatiran, pelarangan aborsi di berbagai negara masih terus dipertahankan dengan alasan-alasan moral dan agama. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan aborsi sebagai bagian dari hak kesehatan seksual dan reproduksi melalui lensa feminisme dengan membedah derajat pengakuan atas integritas tubuh, *personhood*, kesetaraan, dan keberagaman perempuan. Melalui pendekatan perbandingan antara Indonesia dan Nepal, tulisan ini berpendapat bahwa pengaturan aborsi Nepal memiliki pengakuan yang lebih kuat atas integritas tubuh, *personhood*, kesetaraan, dan keragaman perempuan dibandingkan dengan Indonesia. Oleh karena itu, pengalaman Nepal dalam mengatur aborsi dapat dijadikan inspirasi bagi Indonesia dalam menjamin hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.

Kata kunci: kesehatan seksual dan reproduksi, hukum tentang aborsi, perempuan, Nepal, Indonesia

**Desintha Dwi Asriani¹, Godefridus Samderubun²,
& Eling Wening Pangestu³**

Departemen Sosiologi FISIPOL Universitas Gadjah Mada^{1&2} &
Departemen Komunikasi FISIPOL Universitas Gadjah Mada³

**Pengetahuan dan Keterampilan Artikulasi Hak Kesehatan
Seksual dan Reproduksi (HKSR) di Kalangan Perempuan
Muda Asli Papua**

*The Knowledge and Skill to Articulate Sexual and Reproductive
Health and Rights (SRHR) among Indigenous Young Women in
Papua*

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 1, April 2023, hlm. 61—72, 44 daftar
pustaka

This article discusses the extent to which the SRHR narrative is reproduced in the Papuan context. In the process, data collection was carried out by combining document studies, self-reflexive, and interviews. The involvement of one of the researchers who is also an Indigenous Papuan (Orang Asli Papua – OAP) allows for self-reflection regarding the context and issues of SRHR in Papua. While in the interview process, women's bodily experience is placed as a center for understanding the dynamics of reproductive health problems in the broader context of Papua. Specific issues such as unwanted pregnancies (Kehamilan Tidak Diinginkan – KTD) are key topics during the interview process. The results of the study show that SRHR issues among young people in Papua cover specific issues such as unwanted pregnancy, HIV/AIDS, and violence against women. However, in the exploration of specific topics such as KTD, it was found that there is a gap in knowledge and skills in understanding and translating the substance of SRHR due to conflicting economic issues, traditions, and changes in meaning around sexuality due to the influence of modernization. Therefore, the intersectionality framework, both theoretically and methodologically, has the potential to be developed for further studies to obtain a comprehensive mapping of the dynamics of SRHR challenges and the need for innovative approaches in Papua.

Keywords: SRHR, young women, gender, sexuality, Papua

Artikel ini mendiskusikan sejauh mana narasi HKSR direproduksi pada konteks Papua. Dalam prosesnya, pengumpulan data dilakukan dengan mengombinasikan studi dokumen, refleksi diri (*self-reflexive*), dan wawancara. Keterlibatan salah satu peneliti yang juga Orang Asli Papua (OAP) memungkinkan terjadinya refleksi diri terkait konteks dan isu HKSR di Papua. Sementara dalam proses wawancara, pengalaman ketubuhan perempuan ditempatkan sebagai pusat untuk memahami

dinamika problem kesehatan reproduksi dalam konteks yang lebih luas di Papua. Isu spesifik seperti kehamilan tidak diinginkan (KTD) menjadi topik kunci selama proses wawancara. Hasil studi menunjukkan bahwa isu HKSR di kalangan pemuda di Papua melingkupi isu-isu spesifik, seperti KTD, HIV/AIDS, dan kekerasan terhadap perempuan. Namun dalam eksplorasi topik khusus seperti KTD, ditemukan bahwa terdapat kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami hingga menerjemahkan substansi HKSR karena benturan isu ekonomi, tradisi, dan perubahan-perubahan pemaknaan seputar seksualitas akibat pengaruh modernisasi. Kerangka interseksionalitas baik secara teori maupun metodologi sangat potensial untuk dikembangkan pada studi lebih lanjut untuk mendapatkan pemetaan yang komprehensif mengenai dinamika tantangan HKSR berikut kebutuhan inovasi pendekatan di Papua.

Kata kunci: HKSR, perempuan muda, gender, seksualitas, Papua

Abby Gina Boang Manalu¹ & Asri Pratiwi Wulandari²
Jurnal Perempuan¹ & Universitas Indonesia²

**Feminisme dan Keadilan Reproduksi: Mempersoalkan
Aborsi Berdasarkan Pengalaman Aktivisme HKSR**

*Feminism and Reproductive Justice: Shaping Abortion Discourse
Based on the Experience of SRHR Activism*

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 1, April 2023, hlm. 73—86, 2 gambar, 2
tabel, 36 daftar pustaka

In Indonesia, abortion is categorized as an illegal and criminal act. Even though abortion due to medical indications and rape are exempt from criminal status, access to legal abortion is still almost impossible. Therefore, discussion about legal abortion and safe abortion cannot be done separately, for the criminalization of abortion is one of the factors behind unsafe abortions. Through focused discussions with 20 women activists representing civil society organizations who advocate for gender justice and SRHR in Indonesia, this research aims to document and reflect critically on the situation of reproductive injustice in the issue of abortion in Indonesia using a feminist lens. Building this research within the framework of reproductive justice thinking based on feminist praxis, we selected women activists as our informants. SRHR activists are the closest to and the most involved subjects in the feminist praxis of promoting reproductive justice, particularly on the issue of abortion.

Keyword: reproductive justice, intersectionality, safe abortion, legal abortion, feminist activism

Di Indonesia, aborsi dikategorikan sebagai tindakan yang ilegal dan kriminal. Meskipun aborsi karena indikasi medis dan perkosaan dikecualikan dari tindak pidana, akses terhadap aborsi legal tetap nyaris tidak dapat dilakukan. Maka itu, diskusi terkait aborsi legal dan aborsi aman tidak dapat dipisahkan sebab kriminalisasi aborsi adalah salah satu alasan dilakukannya aborsi tidak aman. Melalui diskusi terarah bersama 20 aktivis perempuan perwakilan dari Organisasi Masyarakat Sipil yang mengadvokasi keadilan gender dan HKSR di Indonesia, penelitian ini mendokumentasikan dan merefleksikan secara kritis dengan lensa feminisme tentang situasi ketidakadilan reproduktif dalam isu aborsi di Indonesia. Aktivist perempuan dipilih menjadi narasumber penelitian ini sebab penelitian ini dibangun dalam kerangka pemikiran keadilan reproduktif yang berbasis pada praxis feminis. Aktivist HKSR adalah kelompok yang paling dekat dan terlibat pada praxis feminis mendorong keadilan reproduktif, khususnya pada isu aborsi.

Kata kunci: keadilan reproduktif, interseksionalitas, aborsi aman, aborsi legal, aktivisme feminis

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Alamanda Tower, 25th Floor,
Jalan T.B. Simatupang kavling
23-24, Jakarta Selatan
Telepon: (62) 21 2965 7992

YAYASAN
Ipas
INDONESIA

Mitra untuk
Keadilan Reproduksi

